

Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia

Afifah Nur Millatina¹, Fifi Hakimi², Irham Zaki³, Isna Yuningsih⁴
Universitas Airlangga^{1,2,3} dan Universitas Mulawarman⁴

e-mail: milea1903@gmail.com ; fifihakimi08@gmail.com ; irham-z@feb.unair.ac.id ;
isna.yuningsih@feb.unmul.ac.id

Diterima: Juni 2019; Dipublikasikan Juni 2019

ABSTRAK

Kontribusi dari sektor pariwisata secara internasional dan nasional memperlihatkan prospek ekonomi yang sangat berdampak positif. Peran pemerintah berupa kebijakan dalam upaya untuk pengembangan dan regulasi pariwisata pada rencana pembangunan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan memperlihatkan bahwa pemerintah sudah menyadari akan besarnya dampak dan manfaat yang diberikan oleh sektor pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran pemerintah untuk membangun khususnya pada pembangunan pariwisata di Indonesia. Peningkatan pada sektor kepariwisataan juga mampu menggalakkan kegiatan ekonomi antara lain lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan penerimaan devisa negara dapat meningkat melalui upaya pengembangan berbagai potensi kepariwisataan Nasional. Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut salah satu sektor yang berpotensi bagi Indonesia.

Kata Kunci: peran pemerintah; pembangunan ekonomi islam; pariwisata halal

ABSTRACT

The contribution from tourism sector internationally and national show economic prospects that have a give positive impact. The role of government in the form of policies in efforts to develop and regulate tourism in the economic development plan in Indonesia, namely the discussions conducted by the government will increase the insight and benefits provided by the tourism sector. This research was conducted on analyzing the role of government to develop specifically in tourism development in Indonesia. Increasing in the tourism sector can promote economic activity, including employment, community income, regional income, and state foreign exchange earnings can be increased through efforts to develop various national tourism potentials. Development in the tourism sector is one of the breakthroughs to increase regional and state revenues. The tourism sector will be aligned with other sectors in an effort to increas state revenue, so tourism can be called one of potential sectors for Indonesia.

Keywords: government's rol; islamic economic development; halal tourism

PENDAHULUAN

Pariwisata ialah salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Divisi pariwisata di Indonesia hal yang sangat mudah dikembangkan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, keamanan dan manajemen yang baik agar mampu menciptakan divisi pariwisata yang diminati wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara dengan rasa kepuasan yang tinggi. Dalam hal ini, jadi wisatawan akan menciptakan niat ingin berwisata kembali, dengan kata lain akan menciptakan dampak positif bagi Negara dan masyarakat sekitar tempat wisata. Peran kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan pariwisata sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata negara. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya. Pembangunan wilayah dalam objek pariwisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah tersebut, pariwisata dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekitar area wisata tersebut.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia menjadikan divisi pariwisata Negara mampu berperan dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang didapat dari konsumsi wisatawan selama melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata di Indonesia (Singagerda, 2014). Potensi wisata yang dimiliki ini dikembangkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperoleh devisa negara. Dari komoditas-komoditas ekspor terbesar di Indonesia pada tahun 2010-2014, pariwisata menghasilkan devisa dengan rata-rata 9.299,79 juta USD. Pada tahun 2014, nilai ekspor pariwisata sebesar 11.166,13 juta USD menempati posisi keempat setelah komoditas minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Devisa negara yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata tersedia pada tabel 1:

Tabel 1: Penerimaan Devisa Menurut Jenis Komoditas di Indonesia Tahun 2010-2014

No	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Minyak & gas bumi	28,039.60	41,477.10	36,977.00	32,633.20	30,318.80
2	Batu bara	18,499.30	27,221.80	26,166.30	24,501.40	20,819.30
3	Minyak kelapa sawit	13,468.97	17,261.30	18,845.00	15,839.10	17,464.90
4	Karet olahan	9,314.97	14,258.20	10,394.50	9,316.60	7,021.70
5	Pariwisata	7,603.45	8,554.39	9,120.85	10,054.15	11,166.13
6	Pakaian jadi	6,598.11	7,801.50	7,304.70	7,501.00	7,450.90
7	Alat listrik	6,337.50	7,364.30	6,481.90	6,418.60	6,259.10
8	Tekstil	4,721.77	5,563.30	5,278.10	5,293.60	5,379.70
9	Kertas dan barang dari kertas	4,241.79	4,214.40	3,972.00	3,802.20	3,780.00
10	Makanan olahan	3,620.86	4,802.10	5,135.60	5,434.80	6,468.80
11	Bahan kimia	3,381.85	4,630.00	3,636.30	3,501.60	3,853.70
12	Kayu olahan	2,870.49	3,288.90	3,337.70	3,514.50	3,914.10

Sumber: Kementerian Pariwisata, 2016

Industri pariwisata saat ini telah memberikan kontribusi sebagai pendapatan devisa terbesar yang naik dari peringkat ke-lima pada tahun 2005 menjadi peringkat keempat di 2012 dengan penerimaan devisa sebesar US\$10 miliar pada tahun 2012. Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja yang diserap divisi pariwisata mencapai 10,2 juta atau sekitar 8,9 % dari total jumlah pekerja di Indonesia dan menempati peringkat keempat dalam hal pencipta tenaga kerja terbesar (BPS, 2014).

Peranan divisi pariwisata ini penting dikembangkan dalam upaya pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pada kesejahteraan masyarakat secara nasional. Pembangunan sektor pariwisata ini perlu kerjasama dari berbagai pihak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, *stakeholders*, dan masyarakat secara luas dalam menjaga kualitas layanan yang ditawarkan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, strategis pembangunan nasional salah satu prioritasnya adalah pembangunan pada sektor unggulan, yang termasuk di dalamnya adalah sektor pariwisata. Hal ini didukung oleh kebijakan pembangunan pariwisata sesuai arah Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas) 2010-2015 ialah dengan pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan pariwisata (Teguh dan Avenzora, 2013).

Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global (Samori, Salleh, & Khalid, 2016 :132). Dinamika pariwisata dunia dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah perjalanan antar negara dan pertumbuhan perekonomian terutama di kawasan Asia Pasifik. Total wisatawan dunia pada tahun 2014 mencapai nilai 1.110 juta perjalanan luar negeri atau tumbuh 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 lebih dari 300 juta (27,1% dari total wisatawan dunia) melakukan wisata ke Asia dan 96,7 juta di antaranya masuk ke Asia Tenggara. Sementara pada tahun 2015 ditengah situasi global yang tidak kondusif, perjalanan wisatawan dunia masih tumbuh 4,5%. Jadi, pariwisata tetap mengalami pertumbuhan signifikan. Dengan demikian, sudah dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk menyediakan dan pemenuhan yang lebih baik tentang persyaratan kebiasaan dan keinginan khusus bagi wisatawan Muslim (Prayag dan Hosany, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor unggulan pembangunan nasional dipandang sebagai strategi pembangunan yang sesuai dengan potensi sumberdaya di Indonesia. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, pengembangan sektor pariwisata khususnya pariwisata halal ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia sehingga dapat mendorong perekonomian nasional melalui kontribusi pendapatan berbagai pelaku serta sektor ekonomi di Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penelitian peran pemerintah untuk meningkatkan potensi sektor pariwisata pada perekonomian di Indonesia ini penting untuk diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Pemerintah

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal: makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin terbentuk tanpa keikutsertaan pemerintah dalam membela yang lemah

atau memberikan jaminan sosial kepada mereka yang membutuhkan, termasuk menyangkut masalah perekonomian (an-Nabahan, 2000).

Harta yang dikumpulkan dengan jalan yang dibenarkan sesuai syariat dan pemiliknyanya memanfaatkan dengan cara jujur, baik dan sederhana, maka harta yang masih tersisa di tangan pemiliknyanya wajib dilindungi oleh negara dan dijamin keselamatannya dengan undang-undang hak milik. Masyarakat wajib menghormati hak miliknya itu, sebagaimana firman Allah:

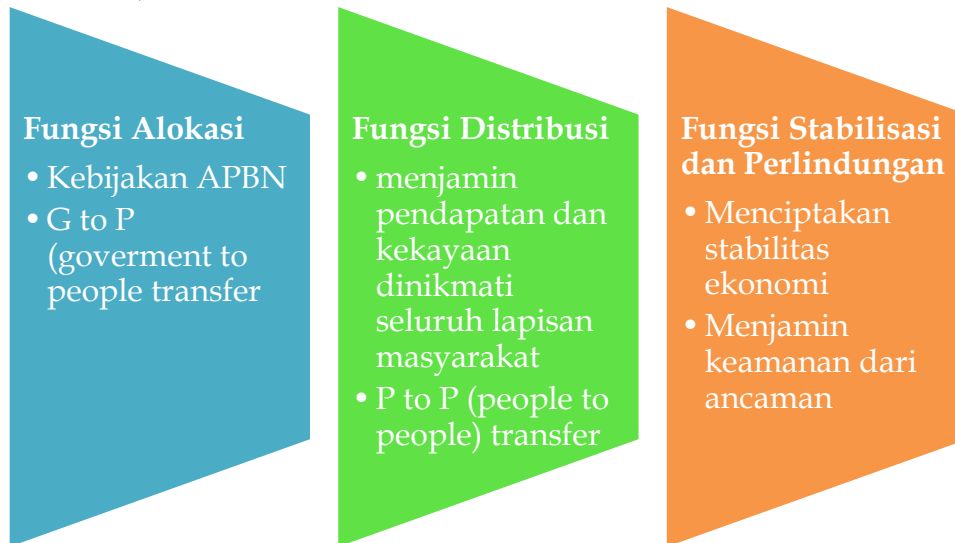
بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil. (Al-Baqaroh: 188)

Peran pemerintah atau negara dalam perekonomian ada 3 (tiga), yaitu: (Beik & Arsyianti, 2017)

- a. *Ideological role* (peran ideologis)
- b. *Developmental role* (peran pembangunan), dan
- c. *Welfare role* (peran kesejahteraan)

Adapun fungsi negara dalam perspektif Islam, paling tidak ada 3 (tiga) yaitu: (Beik & Arsyianti, 2017)



Selanjutnya, peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah adalah “eksekutor pembangunan” sebagai salah satu upaya untuk mentransformasi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih produktif. Untuk itu, pemerintah harus mempunyai arah dan tujuan serta kebijakan pembangunan yang jelas.

Pembangunan Ekonomi Islam

Menurut Sukirno (2015) pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin membaik dan teknologi semakin maju. Huda (2015) “Economic development is the development of economic wealth of countries or regions for the well-being of their inhabitants. The study of economic development is known as development economics” (Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Studi

tentang pembangunan ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan). Menurut Sadaq (2006) mendefinisikan ekonomi pembangunan dalam Islam adalah keseimbangan dan berkelanjutan dalam hal materi maupun non-materi yang tidak lengkap tanpa standar moral yang tinggi yang dihasilkan dari moral Islam. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia saja, akan tetapi kesejahteraan akhirat. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, material, dan moral.

Professor M.A Mannan memandang bahwa konsep pembangunan dalam Islam mempunyai keunggulan dibandingkan dengan konsep modern tentang pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata-mata tetapi juga dari tujuan ilahi yang tertara dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.

Pariwisata Halal

Pada dasarnya, pariwisata halal yaitu bentuk pariwisata religius yang mewakili kepatuhan dan ketaatan terhadap ajaran Islam (World Travel Market, 2007), menawarkan tujuan yang menyediakan produk dan layanan halal yang cocok untuk wisatawan Muslim. Pariwisata halal memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan Muslim karena meyakinkan mereka bahwa masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan hukum Syariah dipelihara (Isa dkk, 2018). Dalam arti tertentu ini maka, memberi wisatawan Muslim ketenangan pikiran disaat melakukan perjalanan, sebagai lawan dari pariwisata konvensional, di mana wisatawan Muslim harus secara aktif mencari produk dan layanan berbasis halal atau menghindari hal-hal yang dilarang untuk mematuhi syariat Islam.

Agama sangat berhubungan dengan halnya pariwisata halal, yang mana telah diakui sejak lama sebagai faktor yang berpengaruh dalam pariwisata (Wall dan Mathieson, 2006; Battour dkk., 2011; Henderson, 2011; Jafari dan Scott, 2014; Eid dan El-Gohary, 2015). Wisata Syariah atau pariwisata halal adalah salah satu kegiatan pariwisata yang di peruntukan bagi wisatawan Muslim maupun non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah atau sesuai dengan kaidah-kaidah islam. Pariwisata Syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

PEMBAHASAN

Pariwisata dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadi ketika secara internasional, orang menyeberangi perbatasan untuk liburan atau bisnis dan tinggal setidaknya 24 jam tetapi kurang dari satu tahun (Mill dan Morrison, 1998:2). Definisi WTO (*World Tourism Organisation*) tentang pariwisata sekarang ini menjadi salah satu yang paling banyak diterima di seluruh dunia. Chadwick (1994:66) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan orang di luar lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dan tujuan perjalanan utamanya selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di tempat yang dikunjungi.

Pariwisata yaitu suatu perjalanan sebagai suatu fenomena ekonomi yang kegiatan industrinya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pihak terkait dan

sekitarnya. Pariwisata juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk (67): 15 yang berbunyi:

التَّشْوِيرُ وَإِلَيْهِ ۖ رِزْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَتَاكِهَهَا فِي فَا مَشُوا ذُلُولًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ
huwa'l-laẓī ja'ala lakumu'l-arḍa ẓalūlan famsyū fi manākibihā wa kulū mi'rizqih,
wa ilaihi'n-nusyur

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Q.S.Al-Mulk [67]: 15: Departemen Agama Republik Indonesia). Pariwisata yaitu konsep yang rumit mencakup berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, politik, perilaku, budaya, dan lingkungan. Medic & Middleton (1973) menegaskan bahwa konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, dan manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para turis. Menurut buhalis (2000) meyakini bahwa tujuan wisata memiliki lima unsur penting, yaitu fasilitas, kegiatan, atraksi, akses, dan terkait sisi jasa pariwisata.

Pariwisata Islam atau wisata dalam Islam berfokus pada isu-isu seperti tempat (tujuan Islam), keterlibatan (Muslim), produk (daerah tempat tinggal, minuman dan makanan), dimensi (ekonomi, budaya dan agama) dan pengelolaan proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis). Niat dan motivasi yang sangat penting dalam Islam, karena mereka terkait dengan tujuan dan sikap mereka (Ala-Hamarneh, 2011; Hassan, 2007; Henderson, 2010). Di beberapa negara, seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia, istilah wisata Islam atau wisata religi lebih dikenal sebagai wisata syari'ah.

Sebagai konsekuensi tumbuhnya dari pasar mengenai konsumsi yang halal, maka dari sisi demografi konsumen Muslim memfokuskan pada ketentuan ini. Konsumsi yang halal memberikan pengaruh dalam membuka kemungkinan cakrawala baru. perusahaan-perusahaan besar yang bersifat multinasional mampu memproduksi minuman ringan, permen karet, dan suplemen kesehatan, vaksin, susu formula, bahan dan banyak lagi. Konsumen halal ditargetkan sebagai segmen pemasaran baru. Selain itu, produk halal untuk konsumen memberikan ruang bagi semua orang sebagai perkumpulan global mengenai topik halal (Aminul dan Karkkainen, 2013).

Wisata Halal dalam Industri Pariwisata

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata syariah di Tanah Air. Daya saing pariwisata Indonesia sekarang ini berada di peringkat ke-50 di dunia, dari sebelumnya berada di posisi ke-70. Indonesia terus berusaha menjadi yang terbaik, sehingga pada 2019 Indonesia ditargetkan berada di posisi ke-30. Data statistik wisatawan mancanegara pada Kementerian Pariwisata RI mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara dari sembilan belas pintu masuk utama pada tahun 2015 sebanyak 9,420,240 orang dan periode Januari – Desember 2016 mencapai 10,405,947 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 10,46 % (www.kemenpar.go.id).

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brojonegoro memaparkan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 21,2 % dalam periode Triwulan III 2015 – Triwulan III 2016. Rata-rata kunjungan wisman triwulan III tahun 2016 berjumlah 1.023.793 kunjungan, dan merupakan yang tertinggi berdasarkan catatan statistik kedatangan wisman bulanan. Dampaknya adalah sektor pariwisata secara konsisten menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia (Bappenas, 2016). Pariwisata di tahun 2013 mencapai 10.0541 juta US Dollar, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 11.761.7 juta US Dollar.

Oleh karena itu, Bappenas telah merencanakan pembangunan divisi pariwisata, ialah konsisten pada arah pembangunan hingga tahun 2025 berupa pengembangan kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan *image* Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Brojonegoro (2016) menegaskan bahwa pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia. Selain itu mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. Kebijakan lainnya berupa jaminan lokasi destinasi wisata, penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat, layanan kemudahan bagi turis yang berkunjung, Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pariwisata, promosi wisata Indonesia dan pengembangan 10 destinasi prioritas.

Pada Rakornas Kepariwisata ke-4 pada 6-7 Desember 2016 di Jakarta dengan tema “*Indonesia Incorporated, Meraih Target 15 juta Kunjungan Wisatawan mancanegara dan 265 juta Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2017*”, yang dihadiri lebih dari 700 orang *stakeholder* pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata pertama kali mengumumkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI) yang mengacu pada *Travel and Tourism Competitive Indeks (TTCI) World Economic Forum* dan *United Nations World Organization* yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia untuk mengukur kesiapan area tujuan destinasi wisata. Sejumlah indikator lain juga diterapkan, seperti *policy support* (prioritas pariwisata, daya saing harga, keterbukaan regional, *environment sustainability*), *tourism enabler* (lingkungan bisnis, keamanan, kebersihan dan kesehatan, Sumber Daya Manusia dan tenaga kerja, kesiapan teknologi informasi), *infrastructure* (infrastruktur pelabuhan dan darat, infrastruktur pelayanan pariwisata, infrastruktur bandara,) dan *natural* dan *cultural resources* (sumber daya alam dan sumber daya budaya) (<http://lifestyle.liputan6.com>).

Berbicara tentang wisata halal salah satu daerah yang paling populer di Indonesia ialah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Popularitas nya kian meroket setelah Lombok memenangkan dua penghargaan internasional dalam ajang *World Halal Travel Award 2015* di Uni Emirat Arab (UEA), yaitu *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination* dalam acara *The World Halal Travel Summit* di Abu Dhabi. Lombok berhasil meraih penghargaan tersebut dan mengalahkan kandidat negara-negara Muslim lainnya. Sejak memenangkan penghargaan *World's Best Halal* tersebut, nama Pulau Lombok makin dikenal di dunia, khususnya di kalangan para wisatawan mancanegara (wisman) Muslim atau *Muslim Traveler's*.

Tabel 2: Peringkat Provinsi pada Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019

Destination	IMTI 2018 Score	IMTI 2018 Rank	IMTI 2019 Score	IMTI 2019 Rank
Lombok (NTB)	58	1	70	1
Aceh	57	2	66	2
Riau & Kep. Riau	50	7	63	3
Jakarta	56	3	59	4
West Sumatera	55	4	59	5
West Java	51	6	52	6
Yogyakarta	51	5	52	7
Central Java	47	9	49	8
East Java (Malang)	48	8	49	9
South Sulawesi (Makassar)	30	10	33	10

Sumber: Crescent Rating, 2019

Lombok mempertahankan posisinya sebagai wilayah terkemuka di *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) laporan 2019. Wilayah ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu dari tujuan paling lengkap untuk wisatawan muslim di Indonesia dalam hal berbagai kriteria yang ada. Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kementerian Pariwisata, 2012). Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan layanannya yang bersifat universal. Objek wisata, produk dan jasa wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal ialah sama dengan objek, produk, jasa dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan etika syariah dan nilai-nilai. Maka menurut (Andriani, dkk., 2015) pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi. Dalam perkembangan pariwisata halal, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, pasal 1, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (*The Minister of Tourism*, 2014). Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain, yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah (Peraturan ini telah dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 11 tahun 2016)

Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota. Pembangunan kepariwisataan ialah bagian integral dari rencana pembangun panjang nasional. Pada Undang-Undang RI Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bab I, pasal 3, dinyatakan bahwa kepariwiatn berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*The Minister of Tourism*, 2009).

Indonesia sebagai Kiblat Wisata Halal Dunia

Pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh wisatawan Muslim. Wisata halal bersifat terbuka untuk semua kalangan orang. Kemenparekraf akan menggerakkan wisata halal di restoran, hotel, serta spa. Diharapkan wisata halal dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi. Ciri wisata halal antara lain ada paket-paket wisata halal yang meliputi destinasi ramah wisatawan Muslim, restoran, serta hotel, dan spa yang halal (Teguh dan Avenzora, 2013). Salah satu tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan wisata halal ialah untuk menarik semakin banyak wisatawan mancanegara, terutama Muslim. Terselip pula alasan lain yang mendasari diluncurkannya wisata halal. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata tahun 2013, dari sekitar 7 juta wisatawan dunia 1,2 juta diantaranya adalah Muslim, yang tentunya mengharapkan wisata berbasis sesuai dengan Syariah. Dengan wisata halal, mereka akan mudah menemukan tempat ibadah, makanan dan minuman halal dan hotel. Namun, Indonesia meluncurkan wisata halal bukan hanya semata untuk menarik wisatawan mancanegara hingga meningkatkan jumlah kunjungannya per tahun saja akan tetapi keinginan dari turis domestik juga menjadi alasan. Hal tersebut dikarenakan menurut Kemenparekraf, semakin banyaknya jumlah wisatawan yang mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka akan wisata halal.

Dalam kompetisi *World Halal Tourism Awards 2016* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 24 Oktober - 25 November 2016, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan. Menurut Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, kemenangan ini justru menjadi awal untuk membangun ekosistem baru pada wisata halal di Indonesia, yang akan memberi kontribusi besar bagi pencapaian target kunjungan wisata. Indonesia saat ini sudah menjadi kiblat wisata halal dunia, yang mana dapat dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang sudah diterima Indonesia. Penghargaan dengan 12 kategori yang diraih Indonesia dalam *World Halal Tourism Awards 2016*: (Yahya, 2016)

Sementara itu, Kepala Deputy Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata Nusantara, Esthy Reko Astuty menyatakan, banyak alasan mengapa Indonesia dapat menjadi kiblat bagi pariwisata halal dunia. Pertama, aksesibilitas yaitu bandara yang berstandar internasional dan domestik, serta upaya mengembangkan *soft* infrastrukturnya berupa sumber daya manusia. Kedua, Indonesia memiliki banyak atraksi wisata dunia yang sudah dilengkapi dengan amenities, seperti hotel berstandar internasional. Ketiga, produk pariwisata halal merupakan produk wisata alternatif, artinya setiap wisatawan juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitasnya. Produk wisata halal bukan hanya untuk wisatawan timur tengah, akan tetapi diperuntukkan untuk negara-negara seperti Korea, China, dan Jepang yang juga merupakan segmen pasar potensial. Keempat, Indonesia ialah pasar wisata halal terbesar yang diperkuat dengan tim percepatan pembangunan pada produk wisata halal (<http://lifestyle.liputan6.com>).

Peran Pemerintah untuk Meningkatkan Potensi Pembangunan Pariwisata

Sebagai industri perdagangan dalam bidang jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; pembangunan (*development*) fasilitas utama, perencanaan (*planning*) daerah atau area destinasi wisata, dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*). Berikut ini penjelasan mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut di atas: (Subadra, 2006)

a. Perencanaan Pariwisata

Pariwisata ialah industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang sangat matang. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para *stakeholders*. Masing-masing daerah tujuan wisata mempunyai permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan penggunaan lahan (2) perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata (3) perencanaan infrastruktur yang berhubungan dengan bandar udara, jalan dan keperluan lainnya seperti; air, listrik, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) perencanaan pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan (5) perencanaan keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan area wisata dan para wisatawan.

b. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti listrik, jalan dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti jalan untuk transportasi darat, pembangunan bandar udara, proyek pembuangan limbah dan proyek penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengawas dan penjamin para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang meningkatkan pembangunan pariwisata.

c. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan ialah perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan harus ditaati oleh para *stakeholders*. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata yaitu kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan mancanegara.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan meningkatkan pembangunan pariwisata ialah kebijakan mengenai penanaman modal, ketenagakerjaan dan keuangan, industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan barang dan jasa.

d. Peraturan Pariwisata

Peraturan pemerintah memiliki peran sangat penting terutama dalam melindungi para wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut yaitu: (1) peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya (2) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (*deposit payment*) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain (3) peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti seperti sopir, pilot dan nahkoda. (4) peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti; air, tanah, flora dan fauna yang langka dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Ada banyak usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, selain dengan membangun infrastruktur yang merata seperti akses ke tempat wisata atau tempat penginapan dan transportasi, pemerintah daerah juga harus memiliki program untuk membungkus potensi yang dimiliki oleh daerahnya seperti; mengadakan promosi melalui media cetak maupun digital, paket wisata, membangun objek menarik di tempat wisata, dan lain-lain. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat tentang kepariwisataan juga harus menjamin bahwa pariwisata tidak akan menimbulkan kerugian kepada orang lokal. Diharapkan dengan adanya kepedulian dan usaha pemerintah daerah dalam meratakan pembangunan wisata, sektor pariwisata akan

semakin berkembang dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah dapat meningkat dan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara akan semakin tertarik untuk meluangkan waktunya menikmati kekayaan alam wisata di Indonesia.

Pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat saat ini, tak terkecuali orang muda atau remaja, diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia. Dengan pariwisata, masyarakat juga semakin mengenal perekonomian bangsa.

KESIMPULAN

Pariwisata sangat terikat dengan kehidupan manusia, sehingga pariwisata memiliki dampak positif maupun negatif di segala aspek kehidupan masyarakat seperti pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan pariwisata di Indonesia secara merata dengan cara membangun infrastruktur dan prasarana atau objek yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pemerintah juga dapat membuat program-program seperti studi banding objek wisata dan lain-lain guna mendukung potensi pariwisata di daerah. Mengingat potensi yang dimiliki sektor pariwisata Indonesia di masa depan, maka diperlukan berbagai strategi untuk dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan mengembangkan pariwisata Indonesia. Dalam pariwisata halal diperlukan beberapa aspek utama, yaitu fasilitas ibadah yang memadai, ketersediaan makanan halal, pelayanan buka puasa selama ramadhan, serta adanya pembatasan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah.

Jadi, pariwisata merupakan tanggung jawab bersama maka masyarakat juga harus lebih aktif dan peduli terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia. Khususnya anak millennial saat ini dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan jaman, diharapkan mampu memasarkan dan mengemas potensi-potensi wisata daerah dengan lebih inovatif, unik dan kreatif. Sudah menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat untuk dapat menjadi wadah yang dapat menampung, merawat serta mengembangkan pariwisata daerah demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik di masa datang. Diharapkan dengan media offline dan online, pembelajaran ekonomi dapat dikemas menjadi lebih baik sehingga semakin meningkatkan kepedulian masyarakat luas, khususnya terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Dari pariwisata untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamarneh, A. (2011). Islamic tourism: A long term strategy of tourist Industries in the Arab world after 9/11. *Centre for Research on the Arab World*. Retrieved from <http://www.staff.unimainz.de>.
- Aminul, Islam Md dan Karkkainen, L. (2013). Islamic tourism as a prosperous phenomenon in Lapland. *Thesis*. Rovaniemi University of Applied Sciences.
- Andriani, Dini et al. (2015). *Laporan Awal Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.
- An-Nabahan, M. Faruq, 2002. *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. UII Press, Yogyakarta.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Battour, M., Ismail, M.N. and Battor, M. (2011), "The impact of destination attributes on Muslim tourist's choice", *International Journal of Tourism Research*, Vol. 13 No. 6, pp. 527-540.
- Beik, Irfan Syauqi & Arsyianti, Laily Dwi. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Brojonegoro, B. (2016). Kepala Bappenas Bambang: Daerah harus kompak bantu pariwisata. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2672032/kepalabappenas-bambang-daerah-harus-kompak-bantu-pariwisata>.
- Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management*, 21(1), 97-152. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177\(99\)00095-3](http://dx.doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3).
- Chadwick, R. A. (1994). *Concepts, definitions, and measures used in travel and tourism research*. In *Travel, tourism, and hospitality research: A handbook for managers and researchers*, J. R. B. Ritchie and C. R. Goeldner, eds., 66. New York: John Wiley.
- Crescentrating. 2019. *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019*. <https://www.crescentrating.com/halal-muslim-travel-market-reports.html> Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 dwnload 22 mei 2019
- Eid, R. and El-Gohary, H. (2015), "Muslim tourist perceived value in the hospitality and tourism industry", *Journal of Travel Research*, Vol. 54 No. 6, pp. 774-787
- Hassan, A.R. (2007). Islamic tourism revisited. *Islamic Tourism*, 32(2).
- Henderson, J.C. (2010). Sharia-compliant hotel. *Tourism and Hospitality Research* 10(3), 246-254. DOI: <http://dx.doi.org/10.1057/thr.2010.3>.
- Henderson, J.C. (2011), "Religious tourism and its management: the Hajj in Saudi Arabia", *International Journal of Tourism Research*, Vol. 13 No. 6, pp. 541-552.
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana
- Ibo, A. (eds.). (2016). *Ini 10 daerah dengan indeks pariwisata tertinggi di Indonesia*. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2671822/ini-10-daerhdengan-indeks-pariwisata-tertinggi-di-indonesia>. December 7, 2016

- Ibo, A. (eds.). (2016). *Ini 5 Destinasi dengan Indeks Daya Saing Wisata Tertinggi*. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2673886/ini-5-destinasidengan-indeks-daya-saing-wisata-tertinggi>. December 9, 2016.
- Isa, SM., Chin, PN., & Mohammad, NU. (2018). "Muslim tourist perceived value: a study on Malaysia Halal tourism", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 9 Issue: 2, pp. 402-420. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2016-0083>
- Jaelani, Aan. 2017. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. Available at MPRA Paper No. 76237: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/>
- Jafari, J., & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. *Annals of Tourism Research*, Vol. 44 No. 1, 1–19.
- Kementerian Pariwisata. (2012). *Kememparekrif promosikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata syariah dunia*. Retrieved from <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>.
- Kementerian Pariwisata. 2016. *Ranking devisa pariwisata terhadap komoditas ekspor lainnya*. Di dalam www.kemenpar.go.id [internet]. [diunduh 29 Januari 2019]. Tersedia pada <http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=117>.
- Medic dan Middleton (1973). Product formulation in tourism. *Tourism and Marketing*, 13:173
- Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1998). *The tourism system*. Iowa: Kendall. P. 2.
- Prayag, G. and Hosany, S. (2014), "When Middle East meets West: understanding the motives and perceptions of young tourists from United Arab Emirates", *Tourism Management*, Vol. 40, pp. 35-45.
- Teguh F dan Avenzora R. 2013. *Ekowisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia, Potensi, Pembelajaran, dan Kesuksesan*. Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- The Minister of Tourism. (2014). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Jakarta: Kemenpar.
- The Minister of Tourism. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Kemenpar.
- Sadaq, Abdulhasan M. 2006. *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Samori, Z., Md Salleh, N.Z. dan Khalid, M.M. (2016). Current Trends in Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. *Tourism Management Perspectives*, 19: 131–136. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.

- Singagerda FIS. 2014. Faktor-faktor penentu aliran investasi, dan perdagangan pariwisata serta dampaknya terhadap permintaan dan penawaran pariwisata Indonesia. *Disertasi*. Bogor: Institusi Pertanian Bogor.
- Subadra, I Nengah. 2006. Ekowisata Hutan Mangrove dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus di Mangrove Information Center, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. *(Tesis) S2 Kajian Pariwisata*. Universitas Udayana
- Sukirno, Sadono. 2015. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Wall, G. dan Mathieson, A. (2006), *Tourism: Change, Impacts and Opportunities*, Pearson Prentice Hall, Essex.
- World Travel Market (2007), "*The World Travel Market Global Trend Reports 2007*", London. Yahya, Arief. (2016). Alasan Indonesia Layak Jadi Kiblat Pariwisata Halal Dunia. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2684766/alasan-indonesialayak-jadi-kiblat-pariwisata-halal-dunia>. December 13, 2016.